

# **RINGKASAN**

## **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024**

**2024**



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN 2025**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya sehingga masih diberikan kemampuan melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dan dapat menyelesaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Lhokseumawe tahun 2024.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Lhokseumawe tahun 2024 ini merupakan gambaran atas kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe secara umum selama 1 (satu) tahun berdasarkan tolak ukur kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan segala keterbatasan, kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya beberapa hal dalam proses pencapaian target kinerja selama tahun 2024, akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi untuk dijadikan pedoman bagi penyempurnaan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam proses penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ini, Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Amin

Lhokseumawe, 26 Maret 2025

  
**WALI KOTA LHOKEUMAWE**  
  
**SAYUTI ABUBAKAR, S.H., M.H.**

## DAFTAR ISI

	HAL
<b>Kata Pengantar.....</b>	i
<b>Daftar Isi.....</b>	ii
<b>1. Capaian Kinerja Makro</b>	1
<b>2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar</b>	2
1 Urusan Pendidikan.....	2
2 Urusan Kesehatan.....	13
3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	24
4 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	44
5 Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	51
6 Urusan Sosial.....	62
<b>3. Hasil EPPD dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya</b>	70
1 Hasil EPPD Tahun Sebelumnya.....	70
2 Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya.....	71
<b>4. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah</b>	72
<b>5. Inovasi Daerah</b>	85

# RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

## 1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

<b>PELAPORAN IKK MAKRO TAHUN 2024 KOTA LHOKSEUMAWE</b>							
NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2024	LAJU KINERJA 2024	SATUAN	PEMDA
							KETERANGAN
1	Indeks Pembangunan Manusia	Laju Indeks Pembangunan Manusia	80,26	80.89	0,785	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe
2	Angka Kemiskinan	Laju Angka Kemiskinan	10.73	10.44	-2,703	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe
3	Angka Pengangguran	Laju Angka Pengangguran	8,78	8.47	-3,531	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe
4	Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4.21	4.46	5,938	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe
5	Pendapatan Per-Kapita	Laju Pendapatan Per-Kapita	12125000	12694000	4,693	%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe
6	Ketimpangan Pendapatan	Laju Kelimpangan Pendapatan	0.311	0.294	-5,466	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe

Sumber data : Bappeda Kota Lhokseumawe

## 2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintah wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya :

### 1. Urusan Pendidikan

#### A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pendidikan yang diperoleh oleh Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 dan 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

<b>PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024 (URUSAN PENDIDIKAN) KOTA LHOKSEUMAWE</b>						
<b>No. IKK</b>	<b>Kategori Urusan</b>	<b>Urusan</b>	<b>IKK Outcome</b>	<b>IKK Outcome</b>	<b>CAPAIAN PERSENTASE KINERJA</b>	
					<b>2023</b>	<b>2024</b>
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 5. Jumlah pendidik pada PAUD 6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini 7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV	<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD</b>	<b>70,53</b>	<b>55,66</b>

			atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang			
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi</li> <li>2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</li> <li>3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</li> <li>4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan</li> <li>5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan</li> <li>6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar</li> <li>7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama</li> <li>8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar</li> <li>9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama</li> <li>10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar</li> <li>11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama</li> <li>12. jumlah tenaga</li> </ol>	<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar</b>	<b>76.14</b>	<b>78,11</b>

			<p>kependidikan pada jenjang sekolah dasar</p> <p>13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p>14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</p> <p>15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</p> <p>16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat</p> <p>19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat &amp;nbsp;</p>			
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	<p>1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi</p> <p>2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</p> <p>3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah</p>	<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama</b>	<b>57.74</b>	<b>60,43</b>

			<p>menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</p> <p>4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan</p> <p>5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan</p> <p>6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar</p> <p>7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p>8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar</p> <p>9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p>10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar</p> <p>11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p>12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar</p> <p>13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p>14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</p> <p>15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</p> <p>16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang</p>		
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



			<p>memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat</p> <p>19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat</p>			
1.a.4	<p>Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar</p>	Pendidikan	<p>1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi</p> <p>2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</p> <p>3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan</p> <p>4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan</p> <p>5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan</p> <p>6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)</p> <p>7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala</p>	<p>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan</p>	<b>100</b>	<b>98,71</b>

			sekolah8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

## B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kota Lhokseumawe Tahun 2024 sebesar **Rp. 155.734.244.465** dengan program/kegiatan sebagai berikut :

### Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan beserta alokasi dan realisasi anggaran pada urusan Pendidikan yang dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>151.599.744.381</b>	<b>146.296.430.184</b>	<b>96,50</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.957.501	43.214.100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	149.914.340.200	144.683.320.616	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.299.890	251.953.665	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.500.000	99.291.980	

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.023.646.790	980.341.823	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.000.000	238.308.000	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>			
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>33.108.744.893</b>	<b>9.323.710.131</b>	<b>28,16</b>
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	18.350.731.240	5.408.310.288	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9.400.689.313	2.044.435.547	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.488.817.500	673.989.350	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.868.506.840	1.196.974.946	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>			
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>61.649.400</b>	<b>2.149.250,00</b>	<b>3,49</b>
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	61.154.400	1.778.000	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	495.000	371.250	

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>94.988.500</b>	<b>82.555.500</b>	<b>86,91</b>
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	94.988.500	82.555.500	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>			
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	<b>30.000.000</b>	<b>29.399.400</b>	<b>97,99</b>
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	30.000.000	29.399.400	
	<b>TOTAL</b>	<b>184.895.127.174</b>	<b>155.734.244.465</b>	<b>84,23</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024

### Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe adalah OPD yang melaksanakan urusan wajib di Bidang Pendidikan

### Pegawai / Personil

Jumlah PNS yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2024 berjumlah 100 orang yang tersebar di seluruh Bidang dan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Lhokseumawe. Berikut komposisi PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

JENIS KELAMIN			GOLONGAN				TOTAL
LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	IV	III	II	I	
37	63	100	30	58	12	0	100

### **Proses Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pendidikan setiap tahunnya dilakukan dengan mengusulkan program dan kegiatan yang telah disusun dalam RKA kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas dalam penyusunan RAPBK. Dimana prosesnya sejak dari tahap Musrenbang, RKPD, KUA-PPAS, RKA dan DPA. RAPBK diajukan kepada DPRK dan dibahas sebelum disahkan menjadi APBK. Kegiatan yang disetujui dalam APBK tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### **Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan**

Saat ini sarana dan prasarana yang tersedia untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dapat dikatakan memadai. Namun belum adanya gedung kantor yang memadai merupakan suatu kendala yang cukup mengganggu, terutama untuk penyimpanan dokumen. Kantor yang terlalu sempit menyulitkan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pada Dinas Pendidikan yang terus menerus sifatnya.

## **C. Permasalahan Dan Solusi**

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kota Lhokseumawe Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

### **Permasalahan**

Kedudukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di Bidang Pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan di Kota Lhokseumawe secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Dari sejumlah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe masih memiliki permasalahan dan kelemahan sebagai berikut:

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya kepastian lahan untuk merencanakan pembangunan pada calon penerima manfaat penerapan SPM, sehingga seringkali target sasaran kegiatan yang membutuhkan tidak dapat dibantu.
2. Masih terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang dikarenakan terbatasnya sumberdaya aparatur PNS baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga dalam penerapan SPM tidak terlaksana optimal.
3. Penerapan SPM perlu didukung oleh Pemerintah Daerah baik dari sisi kebijakan (regulasi/peraturan) dan dukungan anggaran terutama untuk koordinasi dan pelaporan (penyediaan data).

**Solusi :**

1. Pemerintah perlu melakukan stimulasi terhadap target sasaran penerapan SPM yang terkendala dalam penyediaan

lahan;

2. Perlu adanya perhatian dari TAPK Lhokseumawe terhadap pengalokasian dana penunjang dalam penerapan SPM Pendidikan Dasar terutama terhadap pengusulan penambahan fasilitas penunjang kegiatan dan penyusunan laporan SPM;
3. Perlu adanya peninjauan kembali terhadap SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang;
4. Perlu adanya penambahan sumber daya Aparatur PNS yang kompeten untuk mendukung penerapan SPM, apabila tidak terpenuhi dapat mengalokasikan anggaran untuk merekrut tenaga fasilitator lapangan ataupun tenaga ahli individual khususnya kegiatan bersumber dana APBK; dan
5. Perlu pengusulan anggaran dan kegiatan yang tepat sasaran sesuai dengan hasil verifikasi kebutuhan untuk menghindari terjadinya perubahan pekerjaan di akhir tahun anggaran.

### **Hal Lain yang Dilaporkan**

Adapun Total Belanja pada Urusan Pendidikan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebesar **Rp. 184.895.127.174** (seratus delapan puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dan terealisasi sebesar **Rp. 155.734.244.465** (seratus lima puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima rupiah ) dengan capaian persentase sebesar **84,23%**

## 2. Urusan Kesehatan

### A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Kesehatan yang diperoleh oleh Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 dan 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

<b>PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024 (URUSAN KESEHATAN ) KOTA LHOKSEUMAWE</b>						
<b>No. IKK</b>	<b>Kategori Urusan</b>	<b>Urusan</b>	<b>IKK Outcome</b>	<b>IKK Outcome</b>	<b>CAPAIAN</b>	
					<b>2023</b>	<b>2024</b>
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	4.84	4,97
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	82.87	98,47
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	84.43	85,06



<b>PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024 (URUSAN KESEHATAN ) KOTA LHOKSEUMAWE</b>						
<b>No. IKK</b>	<b>Kategori Urusan</b>	<b>Urusan</b>	<b>IKK Outcome</b>	<b>IKK Outcome</b>	<b>CAPAIAN</b>	
					<b>2023</b>	<b>2024</b>
			persalinan sesuai standar			
1.b.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	83.83	89,46
1.b.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	77.86	79,08
1.b.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	67.35	97,78
1.b.8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99.91	112,03

<b>PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024 (URUSAN KESEHATAN ) KOTA LHOKSEUMAWE</b>						
<b>No. IKK</b>	<b>Kategori Urusan</b>	<b>Urusan</b>	<b>IKK Outcome</b>	<b>IKK Outcome</b>	<b>CAPAIAN</b>	
					<b>2023</b>	<b>2024</b>
			kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			
1.b.9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	96.99	98,20
1.b.10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84.10	96,80
1.b.11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86.70	97,65
1.b.12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	96.20	100



Adapun program dan kegiatan beserta alokasi dan realisasi anggaran pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Program Kegiatan dan Anggaran serta Realisasi anggaran**  
**pada Urusan Kesehatan**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>72.853.797.363</b>	<b>71.773.813.955</b>	<b>98,52</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.420.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70.401.097.443	69.655.572.492	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	24.548.875	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.280.000	349.486.482	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.228.119.920	1.093.513.806	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	833.300.000	641.272.300	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA</b>			

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
<b>KESEHATAN MASYARAKAT</b>				
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>26.560.048.410</b>	<b>21.718.991.255</b>	<b>81,77</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.509.941.234	2.465.303.296	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.860.403.176	19.188.694.959	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	149.704.000	45.000.000	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	19.993.000	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>			
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>497.857.970</b>	<b>340.058.850</b>	<b>68,30</b>
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	20.000.000	19.755.600	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	96.120.000	87.482.600	

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
	Kabupaten/Kota			
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	381.737.970	232.820.650	
<b>4</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>			
	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>446.693.000</b>	<b>209.228.275</b>	<b>46,84</b>
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	35.000.000	34.807.400	
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	5.000.000	0,00	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	141.180.800	137.418.000	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah	10.300.000	300.000	

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
	Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	10.300.000	9.945.875	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	244.912.200	26.757.000	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>			
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>168.873.445</b>	<b>47.925.000</b>	<b>28,38</b>
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.565.000	1.450.000	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.500.000	500.000	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	118.808.445	45.975.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>100.527.270.188</b>	<b>94.090.017.335</b>	<b>93,60</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Lhokaeumawe Tahun 2024

### Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe adalah OPD yang melaksanakan urusan wajib di Bidang Kesehatan, yang mana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini memiliki fungsi tugas pokok pengelolaan dan manajemen di bidang Kesehatan.

### **Pegawai / Personil**

Jumlah PNS yang berada di Dinas Kesehatan pada tahun 2024 berjumlah 79 orang, dengan komposisi dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS KELAMIN			GOLONGAN				
LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	IV	III	II	I	TOTAL
28	51	<b>79</b>	28	41	8	2	<b>79</b>

### **Proses Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Kesehatan setiap tahunnya dilakukan dengan mengusulkan program dan kegiatan yang telah disusun dalam RKA kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas dalam penyusunan RAPBK. Dimana prosesnya sejak dari tahap Musrenbang, RKPD, KUA-PPAS, RKA dan DPA. RAPBK diajukan kepada DPRK dan dibahas sebelum disahkan menjadi APBK. Kegiatan yang disetujui dalam APBK tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

### **Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan**

Sampai dengan tahun 2024 sarana dan prasarana yang tersedia untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dikatakan memadai dan perlunya peningkatan kapasitas dan sumber daya serta perlunya jadwal kegiatan harian yang terstruktur untuk satu tahun.



### **C. Permasalahan yang Dihadapi**

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kota Lhokseumawe Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### **Permasalahan :**

- ❖ Sasaran Ibu Hamil yang digunakan adalah sasaran Pusdatin sehingga data capaian riil tidak sesuai di wilayah kerja Puskesmas
- ❖ Tidak semua ibu hamil melahirkan di akhir tahun disebabkan ibu baru hamil ditemukan di triwulan 2, 3 dan 4 dan capaian ibu hamil tidak akan melahirkan ditahun berjalan
- ❖ Tidak semua bayi lahir di akhir tahun disebabkan tidak ada persalinan ditahun berjalan
- ❖ ada beberapa indikator yang belum terpenuhi sesuai standar pelayanan Kesehatan balita antara lain balita tidak di imunisasi dan skrening tumbuh kembang sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam SPM pelayanan kesehatan balita.
- ❖ Tidak terdapat sasaran pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar pada wilayah kerja Puskesmas
- ❖ Tidak terdapat sasaran pelayanan kesehatan usia lanjut pada wilayah kerja Puskesmas
- ❖ Memperbanyak Pos Pelayanan di desa agar masyarakat dapat mengakses pelayanan Kesehatan terdekat.
- ❖ Banyak masyarakat yg tidak tau bahwa dirinya sudah terkena Penyakit DM dan enggan untuk cek kesehatan ke fasilitas kesehatan yg ada
- ❖ Kurangnya Dukungan Masyarakat dalam Menangani ODGJ.

- ❖ Penemuan kasus TB anak masih rendah, Investigasi kontak serumah belum 100%, terapi pencegahan tuberkulin masih rendah
- ❖ Masih tingginya stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap penderita HIV AIDS

**Solusi :**

- ❖ Sebaiknya Kota Lhokseumawe menggunakan sasaran ibu hamil riil
- ❖ Target tidak harus 100 % disesuaikan dengan jumlah riil ibu bersalin
- ❖ Target tidak harus 100 % disesuaikan dengan jumlah riil bayi baru lahir
- ❖ Integrasi program untuk mengangkat capaian program SPM yankes Balita
- ❖ Target tidak harus 100 % disesuaikan dengan jumlah riil pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar
- ❖ Target tidak harus 100 % disesuaikan dengan jumlah riil pelayanan kesehatan usia lanjut
- ❖ Koordinasi dengan Lintas Sektor dan kerjasama aparatur desa setempat
- ❖ memperbanyak Edukasi terkait Penyakit-penyakit Tidak menular yang dapat menyebabkan kematian.
- ❖ Perlu adanya kerjasama dengan Lintas sektor terkait program Kesehatan jiwa dan Penanganan ODGJ Mandiri.
- ❖ Meningkatkan skrining TB pada anak, meningkatkan investigasi kontak serumah, pemberian terapi pencegaham tuberkulin harus dilakukan

- ❖ Memberikan edukasi dan penyuluhan kepada siswa SMP, SMA dan mahasiswa tentang HIV AIDS, memberikan informasi kepada faskes agar poli PDP letak lokasinya terpisah dari ruangan lainnya

### Hal lain yang perlu dilaporkan

Total Belanja pada Urusan Kesehatan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebesar **Rp. 100.527.270.188** (seratus milyar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dan terealisasi sebesar **Rp. 94.090.017.335** (sembilan puluh milyar sembilan puluh juta tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dengan capaian persentase sebesar **93,60%**.

## 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh oleh Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 dan 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

<b>PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024 ( URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG) KOTA LHOKSEUMAWE</b>						
<b>No. IKK</b>	<b>Kategori Urusan</b>	<b>Urusan</b>	<b>IKK Outcome</b>	<b>IKK Outcome</b>	<b>CAPAIAN</b>	
					<b>2023</b>	<b>2024</b>
1.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) 2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian	9.60	9,60

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024  
( URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG)  
KOTA LHOKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2023	2024
			rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) 3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA) 4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha) 5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota 6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota 7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	banjir di WS Kewenangan Kab/Kota		
1.c.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) 2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS	60,05	60,05





**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024  
( URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG)  
KOTA LHOKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2023	2024
			<p>memenuhi pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T</p> <p>4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja</p> <p>5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja</p> <p>6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik</p> <p>7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar</p> <p>8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman</p> <p>9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman</p> <p>10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat</p> <p>11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja</p> <p>12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja</p> <p>13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke</p>			

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024  
( URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG)  
KOTA LHOKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2023	2024
			IPALD 14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja			
1.c.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi 2. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting 3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak) 4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak) 5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan 6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kab/kota 7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota 8. Jumlah bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	114.81	103,27





**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024  
( URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG)  
KOTA LHOKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2023	2024
			<p>kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir<sup>5</sup>. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota<sup>6</sup>. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN<sup>7</sup>. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya<sup>8</sup>. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala<sup>9</sup>. Tersedianya data dan profil PD sub-urusan jasa konstruksi</p>			

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024  
( URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG)  
KOTA LHOKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2023	2024
			<p>kabupaten/kota10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota14.</p>			

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024  
( URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG)  
KOTA LHOEKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2023	2024
			<p>Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui15.</p> <p>Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya16.</p> <p>Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya17.</p> <p>Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya18.</p> <p>Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP</p>			

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024  
( URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG)  
KOTA LHOKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2023	2024
			<p>di wilayah kabupaten/kota<sup>20</sup>. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota<sup>21</sup>. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota<sup>22</sup>. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui<sup>23</sup>. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya<sup>24</sup>. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya<sup>25</sup>. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan</p>			

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024  
( URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG)  
KOTA LHOKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2023	2024
1.c.8.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pengawasannya 1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota 3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota 4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir 5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota 6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN 7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0	100

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024  
( URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG)  
KOTA LHKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2023	2024
			<p>kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya</p> <p>8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala</p> <p>9. Tersedianya data dan profil PD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota</p> <p>10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.</p> <p>11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota</p>			

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024  
( URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG)  
KOTA LHOKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2023	2024
			yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/ analis 12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota 13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota 14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui 15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 17. Tersedianya data dan informasi hasil			



**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024  
( URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG)  
KOTA LHKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2023	2024
			<p>pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota</p> <p>19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota</p> <p>20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota</p> <p>21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota</p> <p>22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui</p> <p>23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan</p>			

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024  
( URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG)  
KOTA LHOKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2023	2024
			pengawasannya 24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			

**B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Lhokseumawe Tahun 2024 sebesar **Rp. 21.975.217.780** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

**Program dan Kegiatan**

Adapun program dan kegiatan beserta alokasi dan realisasi anggaran pada urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut : (dapat dilihat pada halaman selanjutnya)

**Tabel 3.6**

**Program Kegiatan dan Anggaran serta  
Realisasi anggaran pada Urusan Pekerjaan Umum**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.615.424.494</b>	<b>6.265.028.805</b>	<b>94,70</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.244.540	125.507.400	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.101.564.514	4.981.781.030	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.140.000	229.870.070	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	931.375.440	709.211.442	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.100.000	218.658.863	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>			
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>7.440.264.980</b>	<b>7.386.314.325</b>	<b>99,27</b>
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7.440.264.980	7.386.314.325	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>			

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>6.546.578.000</b>	<b>6.546.528.000</b>	<b>99,99</b>
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.546.578.000	6.546.528.000	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>			
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>			
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>393.657.000</b>	<b>384.786.600</b>	<b>97,75</b>
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	393.657.000	384.786.600	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>			
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>1.169.583.250</b>	<b>1.162.568.000</b>	<b>99,40</b>
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan	1.169.583.250	1.162.568.000	

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
	Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>			
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100</b>
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>			
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>210.000.000</b>	<b>209.992.050</b>	<b>99,99</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000	209.992.050	
	<b>TOTAL</b>	<b>22.395.507.724</b>	<b>21.975.217.780</b>	<b>98,12</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

### Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe adalah OPD yang melaksanakan urusan wajib di Bidang Pekerjaan Umum.

### Pegawai / Personil

Jumlah PNS yang berada di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat per 31 Desember 2024 berjumlah 53 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

JENIS KELAMIN	GOLONGAN
---------------	----------

LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	IV	III	II	I	TOTAL
42	11	53	7	41	5	0	53

### **Proses Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setiap tahunnya dilakukan dengan mengusulkan program dan kegiatan yang telah disusun dalam RKA kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas dalam penyusunan RAPBK. Dimana prosesnya sejak dari tahap Musrenbang, RKPD, KUA-PPAS, RKA dan DPA. RAPBK diajukan kepada DPRK dan dibahas sebelum disahkan menjadi APBK. Kegiatan yang disetujui dalam APBK tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### **Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan**

Saat ini sarana dan prasarana yang tersedia untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dapat dikatakan memadai dan mulai tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe telah memiliki gedung kantor.

### **C. Permasalahan yang Dihadapi**

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Lhokseumawe Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### **Permasalahan :**

- Kurangnya data lapangan, Sehingga TIM penyusun laporan SPM kesulitan dalam penginputan dan perencanaan kedepan.

#### **Solusi :**



**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024  
(RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN)  
KOTA LHOKEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2023	2024
			yang rumahnya terkena bencana alam 4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi 5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi 6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi 7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana 8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi 9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan			
1.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM3.	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	0



**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024  
(RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN)  
KOTA LHOKEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2023	2024
			Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah			
1.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha 2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	&nbsp; Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani&nbsp;&nbsp; sp;&nbsp;	32.44	0
1.d.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1. Jumlah rumah di kab/kota 2. Jumlah unit PK RTLH 3. Jumlah rumah tidak layak huni 4. Jumlah rumah yang tidak dihuni 5. Rasio rumah dan KK 6. Jumlah rumah pembangunan baru	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)&nbsp;&nbsp;&nbsp;	33.23	5,73
1.d.5	Urusan Pemerintahan	Perumahan Rakyat dan	1. Jumlah perumahan yang	&nbsp; Jumlah perumahan yang	53.49	64,28

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024  
(RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN)  
KOTA LHOKEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2023	2024
	Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kawasan Pemukiman	terfasilitasi PSU 2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum 3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan 4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site) 5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH 6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi 8. Jumlah pengembang yang terregistrasi 9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		

**B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Realisasi belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Lhokseumawe Tahun 2024 sebesar **Rp. 11.192.691.517** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

## Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.8**

**Program Kegiatan dan Anggaran serta Realisasi anggaran pada  
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
<b>1</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>			
	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>841.268.104</b>	<b>838.703.087</b>	<b>99,70</b>
	Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	841.268.104	838.703.087,00	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>			
	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>5.789.399.920</b>	<b>5.686.184.680</b>	<b>98,22</b>
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	5.789.399.920	5.686.184.680	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>			
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>4.709.000.000</b>	<b>4.667.803.750</b>	<b>99,13</b>
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	4.709.000.000	4.667.803.750	

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
<b>TOTAL</b>		<b>11.339.668.024</b>	<b>11.192.691.517</b>	<b>98,70</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2024

### Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan desentralisasi di Bidang Perumahan.

### Pegawai / Personil

Jumlah PNS yang berada di Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024 berjumlah **53** orang, dengan komposisi sebagai berikut:

JENIS KELAMIN			GOLONGAN				
LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	IV	III	II	I	TOTAL
42	11	<b>53</b>	7	41	5	0	<b>53</b>

### Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setiap tahunnya dilakukan dengan mengusulkan program dan kegiatan yang telah disusun dalam RKA kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas dalam penyusunan RAPBK. Dimana prosesnya sejak dari tahap Musrenbang, RKPD, KUA-PPAS, RKA dan DPA. RAPBK diajukan kepada DPRK dan dibahas sebelum disahkan menjadi APBK.

Kegiatan yang disetujui dalam APBK tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### **Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan**

Saat ini sarana dan prasarana yang tersedia untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perumahan dapat dikatakan memadai.

### **C. Permasalahan yang Dihadapi**

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Lhokseumawe Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### **Permasalahan :**

- Indikator penerapan SPM belum dimasukkan kedalam perencanaan daerah maupun perangkat daerah
- Belum dibentuknya Tim penerapan SPM
- Belum dilakukannya pengumpulan data
- Belum dilakukannya perhitungan kebutuhan
- Belum ditetapkannya rencana pemenuhan
- Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pemenuhan SPM
- Keterbatasan sumber daya aparatur pelaksanaan penerapan SPM
- Tidak ada / sedikitnya pelatihan / bimtek aparatur dalam penerapan SPM
- Kepemilikan lahan tidak disertai sertifikat/illegal untuk penyediaan rumah layak huni sesuai penerapan SPM

#### **Solusi :**

- Memasukkan Indikator penerapan SPM dalam perencanaan daerah maupun perangkat daerah
- Membentuk Tim penerapan SPM

- Melakukan pengumpulan data
- Melakukan perhitungan kebutuhan
- Menetapkan rencana pemenuhan
- Mengalokasikan pembiayaan pemenuhan SPM dalam semua tahapan
- Merekrut tenaga kontrak yang kompeten
- Memberikan kesempatan aparatur untuk ikut dalam pelatihan / bimtek penerapan SPM
- Memberikan opsi lain seperti subsidi Sewa ataupun pembangunan rusunawa yang berkelanjutan

**Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan**

Pada Urusan Perumahan Pemerintah Kota Lhokseumawe menganggarkan anggaran pada urusan tersebut sebesar **Rp. 11.339.668.024** (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua puluh empat rupiah) dan terealisasi sebesar **Rp. 11.192.691.517,00** (sebelas milyar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dengan capaian persentase sebesar **98.70%**.

**5. Urusan Ketentraman, Ketertiban, Umum dan Perlindungan Masyarakat**

**A. Capaian Kinerja Outcome**

Capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban, Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 dan 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024 (KETENTRAMAN,  
KETERTIBAN, UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT )  
KOTA LHOEKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2023	2024
1.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani 2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan 3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS 5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum 6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100
1.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100
1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal 2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100.6	100
1.e.4	Urusan	Ketentraman,	1. Persentase	Jumlah warga	100	0,10

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024 (KETENTRAMAN,  
KETERTIBAN, UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT )**

**KOTA LHOEKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2023	2024
	Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 4. Persentase jumlah korban	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100



**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024 (KETENTRAMAN,  
KETERTIBAN, UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT )  
KOTA LHOEKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2023	2024
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana  1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota 2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan 3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan 4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa 5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi 6. Jumlah aparatur	&nbsp;;  Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran&nbsp;;&nbsp;; &nbsp;;  &nbsp;;	100	60,52

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024 (KETENTRAMAN,  
KETERTIBAN, UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT )**

**KOTA LHOEKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2023	2024
			pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran 7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran 8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran			
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15	16,68

**B. Realisasi Belanja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Realisasi belanja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Lhokseumawe Tahun 2024 pada

BPBD Kota Lhokseumawe sebesar **3.406.904.886** dan pada SATPOL PP dan WH Kota Lhokseumawe sebesar **6.003.177.323**, dengan program/kegiatan unggulan di bawah sebagai berikut :

<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>				
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.351.246.521</b>	<b>5.176.262.323</b>	<b>96,73</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.223.164.393	2.142.742.094	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.500.000	83.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	470.839.280	456.171.136	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.037.000	6.403.550	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.838.136.848	1.811.683.043	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	707.569.000	665.762.500	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>			
	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN</b>	<b>906.232.580</b>	<b>791.915.200</b>	<b>87,39</b>

	<b>BENCANA</b>			
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	114.997.335	113.391.500	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	624.901.000	547.769.100	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	106.334.700	73.566.100	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	59.999.545	57.188.500	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>			
	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>110.000.000</b>	<b>34.999.800</b>	<b>31,82</b>
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	34.999.800	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.367.479.101</b>	<b>6.003.177.323</b>	<b>94,28</b>
<b>KANTOR SATPOL PP &amp; WH</b>				
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.233.017.296</b>	<b>6.047.788.318</b>	<b>97,03</b>

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.700.000	10.509.400	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.822.570.000	3.722.706.573	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.000.000	6.965.400	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.140.000	116.458.959	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.800	0,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.032.080.496	1.978.364.651	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.500.000	212.783.335	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>4.485.177.163</b>	<b>4.474.017.359</b>	<b>99,75</b>
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	438.809.242	436.634.500	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	309.000.000	308.955.400	
	Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	3.737.367.921	3.728.427.459	

<b>3</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.351.246.521</b>	<b>5.176.262.323</b>	<b>96,73</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.223.164.393	2.142.742.094	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.500.000	83.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	470.839.280	456.171.136	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.037.000	6.403.550	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.838.136.848	1.811.683.043	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	707.569.000	665.762.500	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>			
	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>906.232.580</b>	<b>791.915.200</b>	<b>87,39</b>
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	114.997.335	113.391.500	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	624.901.000	547.769.100	

	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	106.334.700	73.566.100	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	59.999.545	57.188.500	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>			
	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>110.000.000</b>	<b>34.999.800</b>	<b>94,28</b>
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	34.999.800	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.430.611.960</b>	<b>3.406.904.886</b>	<b>99,31</b>

### C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Lhokseumawe Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian SPM Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat khususnya sub urusan bencana dan sub urusan pemadam kebakaran yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe tidak ditemukan permasalahan yang berarti. Akan tetapi, terdapat banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan

ketiadaan anggaran, serta kegiatan yang telah dilaksanakan juga tidak dapat dilakukan secara maksimal karena anggaran yang minim atau tidak memadai. Guna memaksimalkan kegiatan, yang dapat dilakukan oleh BPBD adalah berkolaborasi dengan instansi/lembaga pemerintahan dan/atau non pemerintahan lainnya.

Selain itu, BPBD Kota Lhokseumawe mendapati kesulitan untuk memenuhi pencapaian kegiatan peningkatan kapasitas aparatur terutama dalam pembina khusus pemadam kebakaran dan tim reaksi cepat. Hal ini dipengaruhi oleh sulitnya menemukan lembaga penyelenggara pelatihan yang dimaksud.

#### **Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Permasalahan**

- Kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Patroli wilayah se Kota Lhokseumawe
- Jumlah PPNS dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe yang minim/kurang memadai.
- Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan uqubat cambuk yang harus segera dilaksanakan setelah adanya putusan dari Mahkamah Syar'iah.
- Kurangnya anggota Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mengikuti pendidikan dasar (Diklat) yang merupakan peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap dalam membentuk perilaku Satpol PP, meningkatkan profesionalisme Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kententraman masyarakat dan menegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan serta perlindungan masyarakat



- Kurangnya biaya operasional yang memadai, seperti dana resiko kerja yang sangat dibutuhkan dan uang siaga oleh anggota Satpol PP Dan WH.

### **Solusi**

- Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana mobilitas tersebut dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak Pemerintah Kota Lhokseumawe maupun Pemerintah Provinsi/Pusat melalui bantuan keuangan/hibah.
- Merencanakan Penambahan personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe untuk mengikuti pendidikan PPNS.
- Merencanakan untuk anggaran eksekusi cambuk dapat ditingkatkan dan pelaksanaan dapat dilaksanakan minimal 6 kali dalam setahun, sehingga penegakan perundang-undangan daerah dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan akan mendapat efek jera.
- Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendidikan dasar kepada anggota Polisi Pamong Praja sehingga menjalani tugas dan fungsinya dengan baik.

Dana Resiko kerja dan siaga sangat dibutuhkan oleh personil mengingat resiko dalam melaksanakan tugas Satpol PP banyak menghadapi permasalahan yang membahayakan petugas sangat diperlukan. Dan dana siaga sangat dibutuhkan dalam menunjang tugas sehari-hari.

## **6. Urusan Sosial**

### **A. Capaian Kinerja Outcome**

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh oleh Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 dan 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

<b>PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024 ( URUSAN SOSIAL ) KOTA LHOKSEUMAWE</b>						
<b>No. IKK</b>	<b>Kategori Urusan</b>	<b>Urusan</b>	<b>IKK Outcome</b>	<b>IKK Outcome</b>	<b>CAPAIAN</b>	
					<b>2023</b>	<b>2024</b>
1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1. Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM3. JumlahTimReaksi Cepat yang dibentuk4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi7. Jumlahrumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,	&nbsp;Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	100

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024 ( URUSAN SOSIAL )  
KOTA LHOKEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2023	2024
			<p>lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang<sup>9</sup>. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu<sup>10</sup>. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter<sup>11</sup>. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia<sup>12</sup>. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan<sup>13</sup>. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah<sup>14</sup>. Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan<sup>15</sup>. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial<sup>16</sup>. Jumlah</p>			

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024 ( URUSAN SOSIAL )  
KOTA LHOKEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2023	2024
			<p>bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat<sup>17</sup>. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan<sup>18</sup>. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar<sup>19</sup>. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga<sup>20</sup>. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga<sup>21</sup>. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk</p>			
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	<p>1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan 2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang 3. Jumlah tempat penampungan</p>	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100	100

PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2024 ( URUSAN SOSIAL ) KOTA LHOKSEUMAWE						
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2023	2024
			<p>pengungsi yang dimiliki</p> <p>4. Jumlah paket permukiman khusus bagi kelompok rentan</p> <p>5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial</p> <p>6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia</p>	<p>kabupaten/kota&amp;n bsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; </p>		

**B. Realisasi Belanja Urusan Sosial**

Realisasi belanja Urusan Sosial di Kota Lhokseumawe Tahun 2024 sebesar **Rp. 3.913.501.577** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

**Program dan Kegiatan**

Adapun program dan kegiatan pada urusan Sosial yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.22**  
**Program Kegiatan dan Anggaran serta**  
**Realisasi anggaran pada Urusan Sosial**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>2.757.872.480</b>	<b>2.713.086.512</b>	<b>98,38</b>

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	2.999.900	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.224.587.300	2.205.388.794	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.140.000	117.952.900	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	962.300	960.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.382.880	290.155.318	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.800.000	95.629.600	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>			
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>308.000.000</b>	<b>296.347.785</b>	<b>96,22</b>
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	308.000.000	296.347.785	
<b>3</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>			
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>845.000.000</b>	<b>840.917.280</b>	<b>99,52</b>
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	690.000.000	686.220.100	

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
	Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	155.000.000	154.697.180	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>			
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>40.000.000</b>	<b>38.158.200</b>	<b>95,40</b>
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	38.158.200	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>			
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.991.800</b>	<b>99,97</b>
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000	24.991.800	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>			
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	15.000.000	0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.990.872.480</b>	<b>3.913.501.577</b>	<b>98,06</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2024

### **Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib**

Dinas Sosial Kota Lhokseumawe adalah OPD yang melaksanakan tugas Pemerintahan Umum dan Pembangunan di bidang Sosial.

### **Pegawai / Personil**

Jumlah PNS yang ada pada Dinas Sosial Tahun 2024 berjumlah **25** orang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

JENIS KELAMIN			GOLONGAN				
LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	IV	III	II	I	TOTAL
13	12	<b>25</b>	4	19	2	-	<b>25</b>

### **Proses Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Sosial setiap tahunnya dilakukan dengan mengusulkan program dan kegiatan yang telah disusun dalam RKA kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas dalam penyusunan RAPBK. Dimana prosesnya sejak dari tahap Musrenbang, RKPD, KUA-PPAS, RKA dan DPA. RAPBK diajukan kepada DPRK dan dibahas sebelum disahkan menjadi APBK. Kegiatan yang disetujui dalam APBK tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

### **Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan**

Pada saat ini sarana dan prasarana yang ada pada Dinsosnaker Kota Lhokseumawe dapat dikatakan sudah memadai, namun belum adanya bangunan gedung kantor mengakibatkan sejumlah arsip tidak tertata dengan baik dan juga masih kurangnya kendaraan roda dua untuk oprasional ke desa-desa.

## **C. Permasalahan yang Dihadapi**



Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kota Lhokseumawe Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

### **Permasalahan**

- Kurangnya anggaran dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan program SPM
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Tenaga Profesional di Bidang Kesejahteraan Sosial.
- Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam menjalankan Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan.

### **Solusi**

- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosial serta terus melakukan Koordinasi dengan Pihak BKPSDM untuk menyediakan Formasi Tenaga Teknis Kesejahteraan Sosial.
- Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada dalam poses pelaksanaan Kegiatan di Lapangan.
- Perlunya perhatian Pemerintah Pusat untuk Program SPM

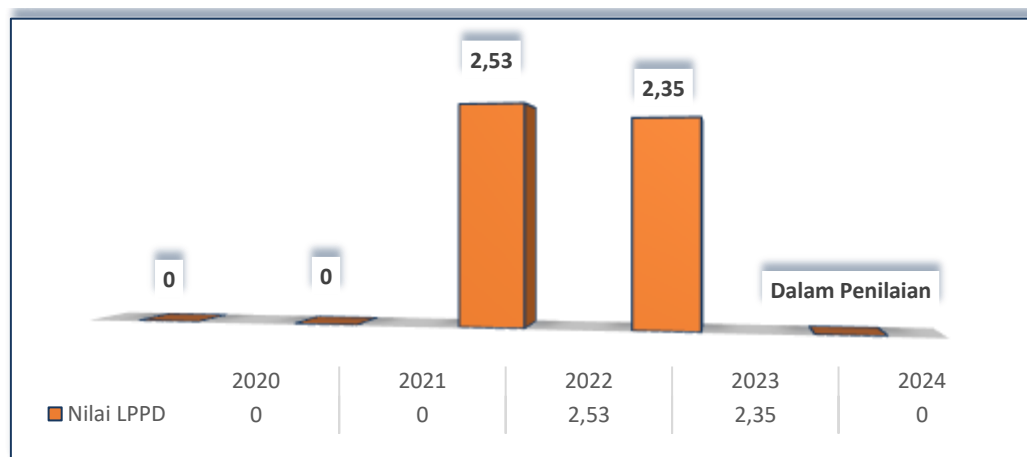
### **Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan**

Pada Urusan Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe menganggarkan anggaran pada urusan tersebut sebesar **Rp. 3.990.872.480,00** (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan terealisasi sebesar **Rp. 3.913.501.577,00** (tiga milyar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan capaian persentase sebesar **98,06%**.

### 3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

#### 1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Kota Lhokseumawe berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 2,3546 dan status kinerja Rendah. Hasil EPPD Tahun 2024 masih dalam proses tahap penilaian Kementerian Dalam Negeri.



Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2020-2024, Nilai LPPD Kota cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020-2021 ditiadakan. Hal ini disebabkan Kemendagri tidak mengeluarkan scoring LPPD tingkat nasional karena terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia. Penilaian kembali dilakukan pada tahun 2022, dimana Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapatkan Nilai LPPD Kota sebesar 2,53 (Rendah). Selanjutnya pada tahun 2023, nilai LPPD Kota turun sebesar poin menjadi 2,35 (Rendah).

#### 2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Nomor 253/S/XVIII.BAC/05/2024 Kota Lhokseumawe berhasil mendapatkan WTP atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 yang berarti Wajar Tanpa Pengecualian.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2020	WTP	WTP	100
2021	WTP	WTP	100
2022	WTP	WTP	100
2023	WTP	WTP	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2020-2023, Pemerintah Kota Lhokseumawe secara berturut-turut mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya capaian kinerja terhadap Opini BPK telah mencapai target yang diharapkan.

#### **4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH**

Target Pendapatan Pemerintah Kota Lhokseumawe pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp.812.003.142.727,53 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 792.383.006.988,92 atau mencapai sebesar 97,58%, dengan perincian rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada Tabel berikut : (dapat dilihat pada halamanselanjutnya)

<b>Kode Rekening</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI 2024</b>	<b>% 2024</b>	<b>REALISASI 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = (4 / 3) * 100</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>812.003.142.727,53</b>	<b>792.383.006.988,92</b>	<b>97,58</b>	<b>755.949.798.672,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>76.093.680.441,53</b>	<b>64.513.980.250,92</b>	<b>84,78</b>	<b>67.901.946.334,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	42.355.409.096,00	41.649.012.954,00	98,33	39.586.915.813,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	900.000.000,00	1.038.412.527,00	115,38	744.194.756,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	6.412.285.050,00	5.801.417.127,00	90,47	6.139.818.064,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	400.000.000,00	331.402.219,00	82,85	348.147.200,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	796.250.000,00	753.173.393,00	94,59	707.298.992,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	18.751.874.046,00	19.202.557.532,00	102,40	17.869.554.495,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	45.000.000,00	41.622.300,00	92,49	41.827.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	80.000.000,00	83.647.887,00	104,56	75.070.521,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	470.000.000,00	254.704.202,00	54,19	183.405.503,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	8.000.000.000,00	6.168.967.640,00	77,11	6.468.194.291,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.500.000.000,00	7.973.108.127,00	122,66	7.009.404.991,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.138.000.000,00	2.694.118.337,00	85,85	3.733.420.512,40
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.788.000.000,00	1.996.776.000,00	71,62	3.025.068.012,40
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	87.165.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	300.000.000,00	647.342.337,00	215,78	621.187.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.200.000.000,00	9.296.221.048,00	57,38	3.236.124.545,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	16.200.000.000,00	9.296.221.048,00	57,38	3.236.124.545,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14.400.271.345,53	10.874.627.911,92	75,52	21.345.485.463,60
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	100.000.000,00	50.956.247,28	50,96	33.312.891,21
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.500.000.000,00	1.038.048.094,91	29,66	625.392.946,99
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	93.556.555,19
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	339.500.000,00	0,00	4.202.400,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	220.000.000,00	185.332.962,00	84,24	296.772.798,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.580.271.345,53	651.187.341,43	41,21	2.315.647.790,98
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	11.105.654.885,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	200.000.000,00	2.007.523.521,72	1.003,76	116.445.000,00
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	8.800.000.000,00	6.602.079.744,58	75,02	6.726.500.196,23
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>76.093.680.441,53</b>	<b>64.513.980.250,92</b>	<b>84,78</b>	<b>67.901.946.334,00</b>

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>722.562.844.443,00</b>	<b>718.110.376.120,00</b>	<b>99,38</b>	<b>687.825.852.338,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	646.739.912.000,00	649.664.202.559,00	100,45	630.906.590.568,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	578.851.938.000,00	581.776.228.559,00	100,51	563.774.771.313,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN</b>	<b>578.851.938.000,00</b>	<b>581.776.228.559,00</b>	<b>100,51</b>	<b>563.774.771.313,00</b>
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	5.730.566.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	62.402.165.000,00	62.402.165.000,00	100,00	61.401.253.255,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	5.485.809.000,00	5.485.809.000,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>67.887.974.000,00</b>	<b>67.887.974.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>67.131.819.255,00</b>
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	75.822.932.443,00	68.446.173.561,00	90,27	56.919.261.770,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	40.560.043.420,00	35.910.026.739,00	88,54	34.250.277.597,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	35.262.889.023,00	32.536.146.822,00	92,27	22.668.984.173,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>75.822.932.443,00</b>	<b>68.446.173.561,00</b>	<b>90,27</b>	<b>56.919.261.770,00</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>722.562.844.443,00</b>	<b>718.110.376.120,00</b>	<b>99,38</b>	<b>687.825.852.338,00</b>

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>13.346.617.843,00</b>	<b>9.758.650.618,00</b>	<b>73,12</b>	<b>222.000.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	222.000.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	222.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.346.617.843,00	9.758.650.618,00	73,12	0,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	13.346.617.843,00	9.758.650.618,00	73,12	0,00
	<b>JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>13.346.617.843,00</b>	<b>9.758.650.618,00</b>	<b>73,12</b>	<b>222.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>812.003.142.727,53</b>	<b>792.383.006.988,92</b>	<b>97,58</b>	<b>755.949.798.672,00</b>

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>847.032.964.141,90</b>	<b>815.594.356.934,68</b>	<b>96,29</b>	<b>728.461.011.932,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>619.101.810.113,90</b>	<b>597.041.816.338,00</b>	<b>96,44</b>	<b>548.509.273.989,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	349.697.492.149,90	340.436.176.707,00	97,35	316.584.344.048,00

<b>Kode Rekening</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI 2024</b>	<b>% 2024</b>	<b>REALISASI 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = (4 / 3) * 100</b>	<b>6</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.692.075.561,00	187.048.276.819,00	94,14	177.812.072.024,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.143.000.000,00	1.143.000.000,00	100,00	470.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	40.211.336.349,00	39.364.353.155,00	97,89	22.501.686.262,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	29.357.906.054,00	29.050.009.657,00	98,95	31.141.171.655,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>103.766.958.008,00</b>	<b>102.279.876.676,68</b>	<b>98,57</b>	<b>60.336.467.761,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.024.284.061,00	18.620.998.870,00	97,88	15.627.696.279,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.186.576.818,00	27.920.996.674,83	99,06	21.923.145.455,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.812.746.487,00	50.092.283.746,85	98,58	18.771.759.227,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.482.274.510,00	5.475.597.385,00	99,88	4.013.866.800,00



<b>Kode Rekening</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI 2024</b>	<b>% 2024</b>	<b>REALISASI 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = (4 / 3) * 100</b>	<b>6</b>
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	261.076.132,00	170.000.000,00	65,12	0,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.171.555.800,00</b>	<b>457.862,00</b>	<b>0,04</b>	<b>52.650.368,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.171.555.800,00	457.862,00	0,04	52.650.368,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>122.992.640.220,00</b>	<b>116.272.206.058,00</b>	<b>94,54</b>	<b>119.562.619.814,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.568.178.720,00	3.847.744.558,00	36,41	3.183.566.844,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	112.424.461.500,00	112.424.461.500,00	100,00	116.379.052.970,00

<b>Kode Rekening</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI 2024</b>	<b>% 2024</b>	<b>REALISASI 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = (4 / 3) * 100</b>	<b>6</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>619.101.810.113,90</b>	<b>597.041.816.338,00</b>	<b>96,44</b>	<b>548.509.273.989,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	349.697.492.149,90	340.436.176.707,00	97,35	316.584.344.048,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	265.941.308.680,81	262.528.840.396,00	98,72	230.967.239.418,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	23.864.800.410,00	22.713.036.373,00	95,17	36.150.532.070,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	48.989.922.059,09	45.174.817.893,00	92,21	39.522.522.729,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.121.073.000,00	9.521.842.045,00	94,08	9.433.238.631,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	178.788.000,00	0,00	0,00	3.931.200,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	497.640.000,00	82,72	506.880.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.692.075.561,00	187.048.276.819,00	94,14	177.812.072.024,00
5.1.02.01	Belanja Barang	42.194.702.349,00	38.782.590.903,00	91,91	38.018.628.219,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	95.854.237.030,00	90.773.969.485,00	94,70	87.118.609.075,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.887.051.439,00	11.028.407.217,00	92,78	9.407.544.971,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	31.700.508.480,00	29.444.965.511,00	92,88	26.224.373.459,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.721.735.560,00	1.684.503.000,00	97,84	862.040.500,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.333.840.703,00	15.333.840.703,00	100,00	16.180.875.800,00

5.1.04	Belanja Subsidi	1.143.000.000,00	1.143.000.000,00	100,00	470.000.000,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.143.000.000,00	1.143.000.000,00	100,00	0,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	0,00	0,00	470.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	40.211.336.349,00	39.364.353.155,00	97,89	22.501.686.262,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	26.564.597.030,00	26.539.309.910,00	99,90	1.823.139.500,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.800.000.000,00
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	1.921.603.980,00	1.915.008.980,00	99,66	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.589.728.000,00	5.916.071.750,00	89,78	9.028.218.745,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	2.088.700.000,00	1.985.647.250,00	95,07	4.314.026.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	178.767.339,00	166.749.176,00	93,28	536.302.017,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	2.867.940.000,00	2.841.566.089,00	99,08	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	29.357.906.054,00	29.050.009.657,00	98,95	31.141.171.655,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.020.598.530,00	4.866.409.565,00	96,93	8.083.822.980,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	9.946.668.024,00	9.825.887.767,00	98,79	8.312.931.250,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	14.390.639.500,00	14.357.712.325,00	99,77	14.744.417.425,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>619.101.810.113,90</b>	<b>597.041.816.338,00</b>	<b>96,44</b>	<b>548.509.273.989,00</b>

<b>Kode Rekening</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI 2024</b>	<b>% 2024</b>	<b>REALISASI 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = (4 / 3) * 100</b>	<b>6</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>103.766.958.008,00</b>	<b>102.279.876.676,68</b>	<b>98,57</b>	<b>60.336.467.761,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.024.284.061,00	18.620.998.870,00	97,88	15.627.696.279,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	365.310.423,00	364.518.200,00	99,78	5.241.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.353.587.500,00	4.349.900.000,00	99,92	1.238.780.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	3.744.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	467.400,00	467.400,00	100,00	10.421.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.718.902.067,00	6.518.472.108,00	97,02	4.822.280.513,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	451.118.585,00	425.076.500,00	94,23	870.275.200,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	726.806.618,00	681.044.750,00	93,70	3.993.106.486,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	250.321.300,00	248.281.400,00	99,19	203.152.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.267.041.981,00	3.144.649.500,00	96,25	2.247.377.370,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	583.200.000,00	581.831.125,00	99,77	34.864.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	3.223.400,00	3.223.400,00	100,00	0,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	164.008.000,00	163.242.200,00	99,53	65.750.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	17.284.000,00	17.279.500,00	99,97	219.869.310,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	1.912.835.400,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.113.012.787,00	2.113.012.787,00	100,00	0,00

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.186.576.818,00	27.920.996.674,83	99,06	21.923.145.455,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	26.686.439.268,00	26.429.192.791,69	99,04	19.838.430.675,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.500.137.550,00	1.491.803.883,14	99,44	2.084.714.780,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.812.746.487,00	50.092.283.746,85	98,58	18.771.759.227,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	39.882.438.987,00	39.248.647.300,00	98,41	15.115.486.300,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	9.734.530.000,00	9.655.025.661,85	99,18	3.438.471.927,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	100.000.000,00	99.984.160,00	99,98	217.801.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.095.777.500,00	1.088.626.625,00	99,35	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.482.274.510,00	5.475.597.385,00	99,88	4.013.866.800,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	436.027.000,00	433.668.825,00	99,46	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	252.014.000,00	247.695.050,00	98,29	7.475.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	4.006.391.800,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.794.233.510,00	4.794.233.510,00	100,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	261.076.132,00	170.000.000,00	65,12	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	261.076.132,00	170.000.000,00	65,12	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>103.766.958.008,00</b>	<b>102.279.876.676,68</b>	<b>98,57</b>	<b>60.336.467.761,00</b>

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.171.555.800,00</b>	<b>457.862,00</b>	<b>0,04</b>	<b>52.650.368,00</b>

5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.171.555.800,00	457.862,00	0,04	52.650.368,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.171.555.800,00	457.862,00	0,04	52.650.368,00
	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>1.171.555.800,00</b>	<b>457.862,00</b>	<b>0,04</b>	<b>52.650.368,00</b>

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>122.992.640.220,00</b>	<b>116.272.206.058,00</b>	<b>94,54</b>	<b>119.562.619.814,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.568.178.720,00	3.847.744.558,00	36,41	3.183.566.844,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	10.181.578.720,00	3.493.888.252,00	34,32	2.843.458.400,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	386.600.000,00	353.856.306,00	91,53	340.108.444,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	112.424.461.500,00	112.424.461.500,00	100,00	116.379.052.970,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	9.929.671.415,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	109.424.461.500,00	109.424.461.500,00	100,00	106.449.381.555,00
	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>122.992.640.220,00</b>	<b>116.272.206.058,00</b>	<b>94,54</b>	<b>119.562.619.814,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>847.032.964.141,90</b>	<b>815.594.356.934,68</b>	<b>96,29</b>	<b>728.461.011.93</b>

					2,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>( 35.029.821.414,37 )</b>	<b>( 23.211.349.945,76 )</b>	<b>66,26</b>	<b>27.488.786.740 ,00</b>

<b>Kode Rekening</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI 2024</b>	<b>% 2024</b>	<b>REALISASI 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = (4 / 3) * 100</b>	<b>6</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>37.029.821.414,37</b>	<b>37.029.821.414,37</b>	<b>100,00</b>	<b>10.541.034.674,37</b>
<b>6.1.01</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	<b>37.029.821.414,37</b>	<b>37.029.821.414,37</b>	<b>100,00</b>	<b>10.541.034.674,37</b>
<b>6.1.01.07</b>	<b>Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>37.029.821.414,37</b>	<b>37.029.821.414,37</b>	<b>100,00</b>	<b>10.541.034.674,37</b>
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>37.029.821.414,37</b>	<b>37.029.821.414,37</b>	<b>100,00</b>	<b>10.541.034.674,37</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
<b>6.2.02</b>	<b>Penyertaan Modal Daerah</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
<b>6.2.02.02</b>	<b>Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>35.029.821.414,37</b>	<b>36.029.821.414,37</b>	<b>102,85</b>	<b>9.541.034.674,37</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818.471.468,61</b>	<b>0,00</b>	<b>37.029.821.414,37</b>

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	37.029.821.414,37	37.029.821.414,37	100,00	10.541.034.674,37
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.029.821.414,37	37.029.821.414,37	100,00	10.541.034.674,37
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	37.029.821.414,37	37.029.821.414,37	100,00	10.541.034.674,37
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	37.029.821.414,37	37.029.821.414,37	100,00	10.541.034.674,37

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00	1.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00	1.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00	1.000.000.000,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00	1.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	35.029.821.414,37	36.029.821.414,37	102,85	9.541.034.674,37
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	0,00	12.818.471.468,61	0,00	37.029.821.414,37



## 5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

No	Nama Inovasi	Uraian singkatan	OPD
1	Mall Pelayanan Publik	Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat pelayanan yang efisien dan responsive. MPP dirancang untuk menjadi pusat pelayanan terpadu yang dapat diakses oleh seluruh warga kota. Dengan mengusung one-stop-service, MPP menawarkan 49 jenis layanan dari 4 instansi vertikal dan 6 OPD Teknis.	DPMPTSPTK
2	Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak	Adalah bentuk inovasi yang mengedepankan tema/konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara/pidana ringan, penyelesaian perkara qanun jinayat, rehab sosial. Kegiatan ini mengusung pendekatan penyelesaian perkara dengan tema pembinaan dan/atau rehabilitasi daripada penyelesaian perkara melalui pidana hukum.	SATPOL PP & WH
3	Lomba Inovasi Daerah (MBA INDAH)	Inovasi yang dilakukan dengan bentuk penganugerahan/reward, dalam Upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah baik dalam urusan pelayanan publik maupun urusan tata kelola pemerintahan kegiatan selesai dilaksanakan pada bulan September	BAPPEDA
4	Aplikasi M-Broh	Aplikasi M-Broh dirancang untuk memudahkan proses retribusi sampah melalui system digital yang transparan dan akuntabel dan memperkuat tata Kelola kebijakan terkait pengelolaan manajemen sampah di Kota Lhokseumawe	DINAS LINGKUNGAN HIDUP